



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BATAM



2026

PERUBAHAN - RENJA

BPBD KOTA BATAM



bpb.go.id



0811 7008 7575



Orchard Walk Blok D No. 3



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 372 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;

b. landasan...

- b. landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Agustus 2026

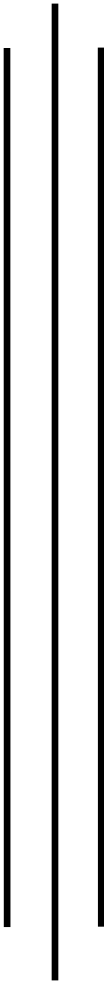
WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 372 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2025-2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2026 semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 21 Agustus 2026

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Batam



Agus Bendri, S.T.
NIP. 19690323 200003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN..... iii
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan..... 3
1.4 Sistematika Penulisan..... 3

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026 4
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026..... 4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 17

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..20

BAB IV PENUTUP 31
4.1 Catatan Penting 31
4.2 Kaidah Pelaksanaan 31
4.3 Rencana Tindak Lanjut31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekaptulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
 Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Triwulan II 5

Tabel 2.2. Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa Indikator
 Kinerja Utama Tahun 2026 s/d Triwulan II 13

Tabel 2.3. Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKK Tahun
 2026 s/d Triwulan II 14

Tabel 2.4. Evaluasi Capaian SPM Tahun 2026 s/d Triwulan II ... 15

Tabel 3.1. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan
 Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun
 2026 22

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;

- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2026 maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2026, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136)
7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1358)

- 8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1631);
- 9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Tahun 2026 Nomor 1721).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2026 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2026 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
2.1	Landasan Hukum
3.1	Maksud dan Tujuan
4.1	Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026
2.1	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	PENUTUP
4.1	Catatan Penting
4.2	Kaidah Pelaksanaan
4.3	Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tidak terdapat potensi realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 Yaitu 100% dengan realisasi/capaian indikator hingga triwulan II Tahun 2026 Mencapai 100%;
- 2) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 Yaitu 100% dengan realisasi/capaian indikator hingga triwulan II Tahun 2026 Mencapai 100%.

2.1.3 Belum terdapat realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Triwulan II

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
1	05				Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Kesekretariatan	87	-	-
						Nilai SAKIP PD	73	-	-
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang terusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100%	40%	40%
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	1	50%
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	60%	60%
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	19 Orang/bulan	38,77%
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3 Dokumen	25%
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	65%	50%	76,92%
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100%
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan : Orang)	10 Orang	0	0
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	78,67%	78,67%
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	25%
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6 Laporan	50%
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	80 %	80 %
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	33,33%
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel				
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	4 Unit	57,14%
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	100%
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
						Jumlah Lapotan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1 Laporan	100%
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	100%
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	0	0%

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
1	05	03			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100 %	100 %	100 %
						Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 %	100 %	100 %
						Persentase Penanganan Pasca Bencana	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota/ Kota	12 dokumen	6 Dokumen	50 %
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	100 Orang	100%
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	100 %	100 %	100 %

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	150 Keluarga	0	0%
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				
						Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRCPB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal Darurat Bencana.	24 Orang	0	0%
1	05	03	2.01	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				
						Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0	0%
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1					2	3	4	5	6 = 5/4*100
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 Kawasan	0	0%
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100%	100%	100%
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				
						Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 Dokumen	0	0%
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
						Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	30 Orang	0	0%
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
						Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Orang	0	0%

Berdasarkan rincian alokasi pendanaan dan target pada tabel di atas, terdapat penyesuaian target kinerja pada beberapa sub kegiatan BPBD Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian peningkatan target capaian tersebut dilakukan sebagai bentuk optimalisasi dan rasionalisasi kinerja seiring dengan adanya penambahan alokasi anggaran, sehingga peningkatan pendanaan tersebut diharapkan dapat berbanding lurus dengan perluasan jangkauan pelayanan, peningkatan efektivitas operasional penanggulangan bencana, serta percepatan pencapaian sasaran strategis daerah secara terukur.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2026, terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 s/d Triwulan II

No	Indikator/ Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun paian Renstra Tahun 2026 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Poin	75	Poin	-	
2	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,34	Poin	-	

Untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026, dilakukan pengukuran terhadap capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana. Adapun capaian masing-masing Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.3 Capaian Kinerja Bidang Urusan Berupa IKK
Tahun 2026 s/d Triwulan II**

No	Indikator/ Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun paian Renstra Tahun 2026 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	Persen	100	
2.	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	Persen	100	
3.	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	Persen	100	
4.	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persen	75	Persen	35	
5.	Persentase penanganan pra bencana	Persen	100	Persen	100	
6.	Persentase penanganan pasca bencana	Persen	100	Persen	100	
7.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	100	Persen	70	

Sebagai bentuk evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar pada Sub Urusan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batam melakukan pengukuran capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari tahun ke tahun. Capaian tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pemenuhan pelayanan kepada masyarakat pada aspek pelayanan informasi rawan bencana, kesiapsiagaan terhadap bencana, dan evakuasi korban bencana. Perkembangan realisasi capaian pelayanan dasar tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2026 s/d Triwulan II

No	Indikator/ Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun paian Renstra Tahun 2026 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama 1 tahun	Dokumen	-	Dokumen	-	
2.	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat tinggalnya selama 1 tahun	Orang	100	Orang	100	
3.	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 tahun	Dokumen	1	Dokumen	-	
4.	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 tahun	Dokumen	-	Dokumen	-	

No	Indikator/ Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun paian Renstra Tahun 2026 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
5.	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rentan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	10	Kawasan	-	
6.	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana dan prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	-	Orang	-	
7.	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat tinggalnya	Laporan	-	Laporan	-	
8.	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di Kawasan tempat tinggalnya	Unit	-	Unit	-	

No	Indikator/ Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun paian Renstra Tahun 2026 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
9.	Jumlah laporan koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah prioritas	Laporan	-	Laporan	-	
10.	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	Dokumen	3	Dokumen	-	
11.	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana Kabupaten/Kota	Laporan	-	Laporan	-	
12.	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan di evakuasi per jenis kejadian bencana	Orang	30	Orang	6	
13.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban	Orang	12	Orang	6	

**Indikator SPM berdasarkan Permendagri 101 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota*

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), masih terdapat sejumlah permasalahan pelayanan yang menjadi hambatan dalam upaya mewujudkan pelayanan kebencanaan yang optimal di Kota Batam. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

- Belum optimalnya penanggulangan bencana

Hal ini terlihat dari masih dominannya pendekatan responsif dibandingkan upaya preventif atau mitigatif. Program pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya terintegrasi dengan perencanaan

pembangunan, sehingga berbagai potensi ancaman seperti banjir, kebakaran, maupun bencana non-alam belum tertangani secara menyeluruh. Keterbatasan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia turut memperlambat efektivitas upaya penanggulangan bencana di lapangan.

- **Koordinasi lintas sektor yang masih terbatas.**

Penanggulangan bencana membutuhkan sinergi dari berbagai perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, serta organisasi masyarakat. Namun dalam praktiknya, koordinasi masih belum optimal, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Perbedaan prioritas antar lembaga, keterbatasan forum koordinasi, serta minimnya mekanisme berbagi sumber daya menyebabkan potensi sinergi yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal.

- **Minimnya data dan informasi kebencanaan**

Data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sangat penting untuk mendukung perencanaan, mitigasi, hingga respons bencana. Namun, saat ini data kebencanaan di Kota Batam masih tersebar di berbagai instansi, belum terstandarisasi, dan sering kali kurang diperbaharui. Akibatnya, pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana belum sepenuhnya berbasis bukti (evidence-based), sehingga mengurangi efektivitas kebijakan maupun tindakan di lapangan.

- **Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.**

Kesadaran masyarakat untuk melakukan kesiapsiagaan, seperti mengikuti pelatihan, menyusun rencana darurat keluarga, atau aktif dalam forum pengurangan risiko bencana, masih rendah. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan edukasi dan sosialisasi mengenai kebencanaan, terutama di wilayah pesisir dan hinterland. Padahal, masyarakat merupakan garda terdepan yang akan terdampak langsung dan menjadi aktor utama dalam penanganan bencana di lingkungannya.

Dengan mengidentifikasi permasalahan pokok, masalah, serta akar masalah secara sistematis, BPBD dapat menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya dalam misi menjaga kelestarian budaya dan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kondisi ini menegaskan bahwa BPBD harus mengantisipasi dengan isu-isu strategis yaitu:

1. Peningkatan risiko bencana akibat perubahan iklim global;
2. Kerentanan kawasan pesisir dan kepulauan terhadap bencana hidrometeorologi;
3. Lemahnya mitigasi bencana akibat pembangunan yang kurang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan;
4. Keterbatasan sumber daya dan sistem informasi kebencanaan;
5. Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;
6. Perlunya sinergi lintas sektor dan integrasi perencanaan pembangunan dengan aspek kebencanaan.

Guna mengatasi berbagai permasalahan pelayanan seperti dominannya tindakan responsif, terbatasnya sinergi lintas sektor, serta rendahnya partisipasi masyarakat dan ketersediaan data, BPBD Kota Batam mengintervensinya secara teknis melalui Program Penanggulangan Bencana. Program ini mencakup berbagai kegiatan strategis dan sub-kegiatan yang dirancang untuk memperkuat seluruh tahapan penanggulangan bencana. Pada tahap pra-bencana dan mitigasi, pemenuhan data serta kesiapsiagaan diintervensi melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana, Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi, serta Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana untuk memberikan kepastian arahan kebijakan berbasis data. Sementara itu, untuk menjawab tantangan keterbatasan sarana dan respon di lapangan, BPBD meningkatkan kapasitas operasional melalui Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC), Respon Cepat Darurat Bencana, Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban, hingga Penyediaan Logistik Penyelamatan yang memadai.

Keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan urusan substansi kebencanaan tersebut sangat bergantung pada kesiapan tata kelola internal yang ditopang melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program penunjang ini secara langsung menjawab isu strategis terkait keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta koordinasi lembaga. Melalui rangkaian kegiatan penunjang—seperti penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, pemenuhan gaji serta pendidikan dan pelatihan pegawai—kapasitas operasional ASN BPBD terus ditingkatkan. Selain itu, keterbatasan fasilitas teknis di lapangan diatasi melalui pengadaan serta pemeliharaan sarana prasarana, gedung kantor, murni sarana operasional seperti kendaraan dinas lapangan, perabotan, hingga peralatan dan mesin. Dukungan penyediaan jasa umum, komunikasi, listrik, logistik kantor, serta penyelenggaraan rapat koordinasi lintas SKPD menjadi fondasi utama yang memastikan seluruh fungsi mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat dapat berjalan secara terintegrasi, responsif, dan akuntabel di Kota Batam.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam pada Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Program dan Kegiatan serta Subkegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Subkegiatan Pengadaan Mebel;
 - 3) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Program Penanggulangan Bencana

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - 1) Subkegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana).
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - 1) Subkegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana;
 - 2) Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
 - 3) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
 - 4) Subkegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.
- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - 1) Subkegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;
 - 2) Subkegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
 - 3) Subkegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Dalam rangka menyesuaikan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dengan perkembangan kebutuhan serta kondisi aktual Tahun Anggaran 2026, BPBD Kota Batam melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja dan Pendanaan. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan target kinerja serta alokasi anggaran pada beberapa program, kegiatan, dan subkegiatan, dengan tetap memperhatikan prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Batam. Perubahan target dan anggaran dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, perkembangan kebutuhan organisasi, serta kemampuan dan ketersediaan anggaran daerah.

Selanjutnya, penyesuaian target dan pendanaan dalam Perubahan Rencana Kerja BPBD Kota Batam Tahun 2026 diharapkan dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah secara efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran. Perubahan tersebut menjadi dasar dalam penyelarasan antara target kinerja dengan kebutuhan pendanaan, sehingga pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan BPBD Kota Batam pada Tahun 2026 dapat berjalan secara optimal serta mendukung peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dan pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan										
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih											
1					2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							7.209.540.315,98	7.541.674.579,00	332.134.263,00										
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.209.540.315,98	7.541.674.579,00	332.134.263,00										
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							7.209.540.315,98	7.541.674.579,00	332.134.263,00										
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip PD	Nilai Sakip PD	73 Nilai	63 Nilai	6.340.337.715,98	6.771.219.221,00	430.881.505,02											
							Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	87 Nilai	71 Nilai														
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun sesuai dengan Tahapan dan Waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Tersusun sesuai dengan Tahapan dan Waktu	100 Persen	100 Persen	6.194.500,00	6.194.500,00	-											
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	6.194.500,00	6.194.500,00	-											
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan	Persentase Pegawai yang Menerima Layanan Administrasi Keuangan	100 Persen	100 Persen	4.830.966.015,98	4.302.825.441,00	(528.140.574,98)											
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	19 Orang/bulan	4.800.966.015,98	4.278.525.441,00	(522.440.574,98)											
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	24.300.000,00	(5.700.000,00)											

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan										
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih											
1					2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	65 Persen	65 Persen	80.987.800,00	95.294.500,00	14.306.700,00											
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	14.737.800,00	29.044.500,00	14.306.700,00											
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	66.250.000,00	66.250.000,00	-											
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persen	100 Persen	251.911.500,00	347.716.500,00	95.805.000,00											
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	10.190.100,00	8.576.700,00	(1.613.400,00)											
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	9 paket	57.749.200,00	59.479.600,00	1.730.400,00											
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	3 paket	59.803.000,00	35.781.400,00	(24.021.600,00)	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	19.663.200,00	19.020.000,00	(643.200,00)	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	104.506.000,00	224.858.800,00	120.352.800,00	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan	100 Persen	100 Persen	876.397.600,00	1.286.168.700,00	409.771.100,00	
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	9 Unit	530.364.000,00	436.534.000,00	(93.830.000,00)	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	32 unit	13.089.700,00	237.897.100,00	224.807.400,00	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	24 Unit	7.738.800,00	250.343.600,00	242.604.800,00	
1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	2 unit	253.764.000,00	253.764.000,00	-	
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	14 Unit	71.441.100,00	107.630.000,00	(36.118.900,00)	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang sesuai Perencanaan	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang sesuai Perencanaan	100 Persen	100 Persen	115.061.600,00	413.114.880,00	(298.053.280,00)	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	105.258.800,00	115.260.000,00	(10.001.200,00)	
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	8.002.800,00	32.011.200,00	24.008.400,00	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	265.843.680,00	264.043.680,00	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah Barang Milik Daerah yang telah dilakukan pemeliharaan dan berada dalam kondisi baik serta dapat digunakan sesuai fungsinya dibandingkan dengan total BMD yang menjadi objek pemeliharaan.	Persentase jumlah Barang Milik Daerah yang telah dilakukan pemeliharaan dan berada dalam kondisi baik serta dapat digunakan sesuai fungsinya dibandingkan dengan total BMD yang menjadi objek pemeliharaan.	100 Persen	100 Persen	178.818.700,00	319.904.700,00	141.086.000,00	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	11.448.700,00	44.040.000,00	32.591.300,00	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	9 Unit	149.340.000,00	255.764.700,00	106.424.700,00	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	29 Unit	18.030.000,00	20.100.000,00	2.070.000,00	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100%	100%	869.202.600,00	770.455.358,00	(98.747.242,00)	
							Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%	100%				
							Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100%	100%				
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang memuat informasi mengenai potensi, tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana yang disusun dan diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun.	Jumlah dokumen yang memuat informasi mengenai potensi, tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana yang disusun dan diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun.	12 Dokumen	12 Dokumen	42.439.200,00	41.939.200,00	(500.000,00)	
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)								

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	100 Orang	42.439.200,00	41.939.200,00	(500.000,00)	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang terlaksana dibandingkan dengan seluruh layanan yang direncanakan dalam satu tahun.	Persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang terlaksana dibandingkan dengan seluruh layanan yang direncanakan dalam satu tahun.	100 Persen	100 Persen	521.150.100,00	358.398.300,00	(162.751.800,00)	
1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam								
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	150 Orang	150 Orang	110.806.300,00	76.047.300,00	(34.759.000,00)	
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi	24 Orang	24 Orang	18.338.600,00	15.401.800,00	(2.936.800,00)	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							penanganan awal darurat bencana	untuk penanganan awal darurat bencana						
1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	334.361.900,00	231.446.900,00	(102.915.000,00)	
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 Kawasan	10 Kawasan	57.643.300,00	35.502.300,00	(22.141.000,00)	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi dibandingkan dengan jumlah korban yang terdampak pada kejadian bencana.	Persentase korban bencana yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi dibandingkan dengan jumlah korban yang terdampak pada kejadian bencana.	100 Persen	100 Persen	305.613.300,00	370.117.858,00	64.504.558,00	
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota								

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 Dokumen	3 Dokumen	170.971.000,00	25.387.100,00	(145.583.900,00)	
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	30 Orang	30 Orang	92.107.300,00	154.442.008,00	62.334.708,00	
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Orang	12 Orang	42.535.000,00	190.288.750,00	147.753.750,00	
J U M L A H											7.209.540.315,98	7.541.674.579,00	332.134.263,02	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2025 – 2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2026, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkan renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Kota Batam Tahun Anggaran 2026;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/ berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD